BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian terdahulu memiliki peran penting dalam menunjukkan perkembangan kajian ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan digital, ruang publik digital, komunikasi deliberatif, serta pemerintahan terbuka. Melalui telaah penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan fokus penelitian, temuan-temuan utama, serta kesenjangan penelitian *(research gap)* yang masih memerlukan pengembangan. Oleh karena itu, penelitian terdahulu dalam penelitian ini tidak hanya digunakan sebagai pembanding, tetapi juga sebagai dasar argumentasi ilmiah dalam menentukan posisi dan kontribusi penelitian mengenai praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan.

Penelitian oleh Annys Zaidha Dahlia Dina (2022), yang berjudul "Model Komunikasi Deliberatif dalam Menangani Diskursus 'Salah Ketik' Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus di Humas Kementerian Sekretariat Negara)" menjadi salah satu rujukan dalam konteks komunikasi deliberatif di ruang publik digital. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Kementerian Sekretariat Negara memanfaatkan model komunikasi deliberatif untuk merespons diskursus publik terkait kesalahan ketik pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan deliberatif yang melibatkan pendengaran terhadap argumentasi publik, deliberasi internal, dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan, dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini berfokus pada proses internal di Kementerian Sekretariat Negara dalam mengelola informasi dan diskursus publik yang berkembang di media massa dan ruang virtual. Melalui pendekatan studi kasus intrinsik, penelitian ini mengidentifikasi model komunikasi deliberatif yang digunakan untuk memahami dan merespons persepsi publik. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan publik yang terjadi di ruang digital dapat menjadi sumber informasi penting dalam proses pengambilan keputusan, di mana pemerintah perlu mendengarkan dan mempertimbangkan argumentasi publik sebelum menetapkan kebijakan (Dina, 2022). Berdasarkan penelitian tersebut dapat dipahami bahwa media sosial pemerintah telah berkembang menjadi sarana komunikasi publik yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Namun demikian,

penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada fungsi media sosial sebagai media diseminasi informasi dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana praktik komunikasi yang berlangsung mampu membentuk ruang publik digital yang mendukung prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Annys Zaidha Dahlia Dina menunjukkan pentingnya komunikasi deliberatif dalam merespons diskursus publik yang sensitif.

Penelitian Annys Zaidha Dahlia Dina menyoroti pentingnya model komunikasi deliberatif dalam merespons diskursus publik yang sensitif, akan tetapi, masih diperlukan kajian yang menjelaskan bagaimana praktik komunikasi deliberatif tersebut diwujudkan melalui media sosial pemerintah sebagai ruang publik digital yang mendorong transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai program Rembag Kaistimewan pada saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis bagaimana praktik komunikasi publik yang berlangsung merepresentasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka melalui pembentukan ruang publik digital.

Penelitian ini juga mendasarkan diri pada kajian-kajian sebelumnya yang menelaah peran media digital dalam meningkatkan transparansi pemerintah dan partisipasi publik, serta keterkaitannya dengan konsep demokrasi deliberatif. Penelitian lain yang relevan dalam konteks ini adalah penelitian oleh Qonita Marta Muisia (2017), dengan judul "Demokrasi Deliberatif dalam Interaksi Komentar Pembaca Portal Berita Online Detik.com (Analisis Isi Komentar Pembaca Portal Berita Online Detik.com pada Pemberitaan Kampanye Ahok-Djarot dalam PILGUB DKI 2017." menyoroti peran interaksi publik di kolom komentar portal berita online dalam mewujudkan demokrasi deliberatif. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada ruang untuk diskusi dan debat terbuka, kualitas demokrasi deliberatif yang ideal belum tercapai dalam konteks ini. Hal ini diindikasikan oleh rendahnya skor dalam setiap unit analisis yang menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip deliberasi publik yang berkualitas (Muisia, 2017). Temuan ini menunjukkan menunjukkan bahwa media digital mampu memperluas ruang diskusi masyarakat melalui interaksi yang lebih terbuka dibandingkan media konvensional. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada media massa maupun media sosial yang digunakan oleh masyarakat, sehingga belum banyak mengkaji bagaimana ruang publik digital dibangun oleh institusi pemerintah sebagai bagian dari praktik komunikasi pemerintahan..

Sebaliknya, berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada praktik komunikasi publik yang dilakukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Rembag Kaistimewan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ruang publik digital dibentuk melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta bagaimana praktik komunikasi yang berlangsung merepresentasikan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, khususnya transparansi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memandang *YouTube* sebagai media penyebarluasan informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi deliberatif yang memungkinkan terjadinya dialog antara pemerintah dan publik.

Perbandingan antara kedua penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam menerapkan konsep demokrasi deliberatif di media digital. Sementara penelitian Muisia menekankan pada tantangan yang ada dalam mewujudkan diskusi publik yang berkualitas melalui komentar di portal berita, riset yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada solusi praktis yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui penggunaan media sosial seperti *YouTube*, pemerintah dapat proaktif dalam memfasilitasi komunikasi deliberatif, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan konten pemerintah, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang konstruktif.

Kedua penelitian ini saling melengkapi dalam menggambarkan hubungan antara kepercayaan publik, komunikasi deliberatif, dan penggunaan media digital oleh pemerintah. Penelitian Muisia mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam menciptakan demokrasi deliberatif melalui interaksi publik di media digital, sementara riset yang dilakukan peneliti menunjukkan bagaimana pemerintah dapat menggunakan teknologi digital untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat partisipasi publik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana komunikasi deliberatif dapat didorong melalui strategi penggunaan media digital yang efektif dalam konteks pemerintahan modern.

Selain itu dalam memulai riset ini peneliti berangkat dari berbagai kajian yang menelaah peran media digital dalam memperkuat transparansi pemerintah dan mendorong partisipasi publik, serta hubungan antara teknologi digital dan konsep demokrasi deliberatif. Selain penelitian oleh Dina (2022) dan Muisia (2017), Kajian lain

yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Fata Zill Rabbani dan Rianna Wati (2024), dengan judul "Komunitas dan Interaksi Penonton pada Siaran Langsung di Kanal *YouTube* NAPLive," yang diterbitkan dalam jurnal Humanus edisi Juni 2024.

Penelitian (Rabbani & Wati, 2024), berfokus pada interaksi penonton dalam siaran langsung di kanal *YouTube* NAPLive, dengan penekanan pada bagaimana interaksi tersebut membentuk komunitas digital yang dinamis. Penelitian ini menunjukkan bahwa siaran langsung di *YouTube* tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai platform yang memfasilitasi komunikasi dua arah antara penyiar dan penonton, serta di antara penonton itu sendiri. Interaksi ini menciptakan ruang publik virtual di mana diskusi dan partisipasi kolektif dapat berkembang, mencerminkan elemen- elemen dari komunikasi deliberatif. Dalam konteks ini, penelitian Rabbani dan Wati menekankan bahwa interaksi yang terjadi dalam komunitas penonton dapat memperkuat rasa kebersamaan dan keterlibatan sosial, yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan demokrasi deliberatif di media digital.

Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, yang berfokus pada penggunaan *YouTube* oleh Paniradya Kaistimewan sebagai alat untuk transparansi dan keterbukaan pemerintah, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan penting. Keduanya menyoroti peran media sosial dalam menciptakan ruang bagi komunikasi publik, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian penulis menitikberatkan pada bagaimana pemerintah dapat menggunakan *YouTube* untuk meningkatkan akses informasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dan pemerintahan terbuka. Dalam hal ini, *YouTube* berfungsi sebagai platform untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Rabbani dan Wati (2024), menunjukkan bahwa fitur interaktif dalam media digital mampu memfasilitasi pertukaran argumentasi antara penyelenggara dan audiens. Namun demikian, penelitian tersebut lebih banyak dilakukan pada konteks media hiburan maupun komunitas daring sehingga belum banyak diterapkan pada forum komunikasi pemerintah daerah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai komunikasi pemerintahan digital, ruang publik digital, komunikasi deliberatif, serta *Open Government* telah berkembang cukup pesat. Penelitian-penelitian tersebut

menunjukkan bahwa media digital memiliki potensi memperluas akses informasi publik, meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta membuka peluang terjadinya komunikasi dua arah. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung mengkaji setiap konsep secara terpisah. Penelitian mengenai komunikasi pemerintahan lebih banyak berfokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi, sedangkan penelitian mengenai ruang publik digital lebih banyak mengkaji media massa maupun komunitas digital. Di sisi lain, penelitian komunikasi deliberatif umumnya dilakukan pada konteks media hiburan atau komunitas daring sehingga belum banyak dikaitkan dengan praktik komunikasi pemerintahan.

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis praktik komunikasi publik dalam program dialog digital yang diselenggarakan pemerintah daerah sebagai ruang publik digital yang dianalisis melalui perspektif komunikasi deliberatif dan prinsip-prinsip Open Government. Padahal, forum dialog digital seperti Rembag Kaistimewan memiliki karakteristik yang berbeda karena mempertemukan pemerintah, narasumber, dan masyarakat dalam satu ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyampaian aspirasi, dan diskusi mengenai kebijakan publik. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini hadir untuk menganalisis praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan sebagai ruang publik digital serta mengkaji bagaimana praktik komunikasi tersebut mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi pemerintahan digital, khususnya mengenai hubungan antara ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan Open Government pada tingkat pemerintah daerah.

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Kesenjangan	Kontribusi Penelitian Ini
Marta (2017)	Ruang Publik Digital	Media digital membentuk ruang diskusi	Tidak membahas komunikasi di lingkup pemerintah	Mengkaji ruang publik digital dalam forum pemerintah
Dina (2023)	Komunikasi Pemerintah	Media sosial mendukung komunikasi publik	Tidak mengkaji deliberasi	Mengintegrasikan komunikasi deliberatif
Rabbani (2024)	Live Streaming	Interaksi audiens tinggi	Konteks Hiburan	Menguji deliberasi dalam komunikasi pemerintah

2.2 Landasan Teori

Dalam landasan teori ini, akan dibahas konsep-konsep yang mendasari pemerintahan terbuka, pemanfaatan media sosial oleh pemerintah, serta relevansi dan

peran *YouTube* sebagai saluran komunikasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana saluran *YouTube* Paniradya Kaistimewan mendukung prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dan bagaimana hal ini berdampak pada keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan di Yogyakarta. Teori-teori terkait akan diuraikan untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi analisis dan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini.

2.2.1 Komunikasi Pemerintahan

Komunikasi pemerintahan merupakan salah satu fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi sarana bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan, membangun hubungan dengan masyarakat, serta memperoleh dukungan publik terhadap penyelenggaraan negara. Dalam perkembangannya, komunikasi pemerintahan tidak lagi dipahami sebatas proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi berkembang menjadi proses interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, aspirasi, dan umpan balik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Secara terminologis, istilah government berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna lebih luas daripada sekadar pemerintah sebagai institusi. Menurut Samuel Edward Finer sebagaimana dikutip oleh Hasan (2023), *government* tidak hanya menunjuk pada organisasi pemerintahan, tetapi juga mencakup aktivitas, proses, metode, dan sistem dalam menjalankan pemerintahan. Finer menjelaskan bahwa government dapat dipahami sebagai *"the activity or process of governing"*, yaitu proses mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai public servant yang memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi kekuasaan *(governing)*, tetapi juga fungsi pelayanan publik *(serving)*.

Hasan (2023) menjelaskan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan proses penyampaian ide, gagasan, kebijakan, dan program pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan mencapai kepentingan negara. Dalam konteks tersebut, pemerintah berperan sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara masyarakat menjadi komunikan yang

menerima pesan. Namun, dalam praktik pemerintahan modern hubungan tersebut berkembang menjadi komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi, kritik, serta masukan kepada pemerintah. Pandangan tersebut sejalan dengan Canel dan Sanders (2013), yang menyatakan bahwa komunikasi pemerintahan *(government communication)* merupakan proses komunikasi yang dilakukan institusi pemerintah untuk menjelaskan kebijakan publik, membangun legitimasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memfasilitasi hubungan yang berkelanjutan antara pemerintah dengan warga negara. Dengan demikian, komunikasi pemerintahan tidak hanya berorientasi pada penyebarluasan informasi, tetapi juga diarahkan untuk membangun dialog dan menciptakan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mengubah paradigma komunikasi pemerintahan dari model komunikasi yang bersifat hierarkis dan satu arah *(one-way communication)* menjadi komunikasi yang lebih partisipatif *(two-way communication)*. Criado, Sandoval-Almazan, dan Gil-Garcia (2013), menjelaskan bahwa pemanfaatan media digital oleh pemerintah telah mengubah pola komunikasi publik melalui penyediaan ruang interaksi yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, menyampaikan aspirasi, serta berpartisipasi dalam proses komunikasi pemerintahan. Oleh karena itu, media sosial pemerintah tidak lagi dipandang sekadar sebagai saluran publikasi informasi, melainkan sebagai media yang berpotensi membangun komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Dalam praktik komunikasi pemerintahan, efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuannya membangun hubungan yang dialogis dengan masyarakat. Hasan (2023), menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi pemerintahan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengelola arus informasi, memanfaatkan umpan balik *(feedback)*, membangun empati, menyederhanakan bahasa komunikasi, mendorong kepercayaan publik, serta mengembangkan kemampuan mendengarkan secara aktif *(effective listening).* Pendapat tersebut sejalan dengan Gibson yang menekankan pentingnya *following up, utilizing*

feedback, encouraging mutual trust, dan *effective timing* sebagai unsur yang menentukan keberhasilan komunikasi organisasi.

Selain itu, komunikasi pemerintahan juga dipengaruhi oleh berbagai hambatan komunikasi. Menurut Effendy (2003), hambatan komunikasi dapat berupa gangguan semantik, gangguan mekanik, perbedaan kepentingan, motivasi tersembunyi, maupun prasangka yang menyebabkan pesan tidak diterima sebagaimana dimaksud oleh komunikator. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan yang efektif harus mampu mengurangi hambatan-hambatan tersebut melalui penyampaian informasi yang jelas, penggunaan media komunikasi yang tepat, serta penyediaan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian ini, teori komunikasi pemerintahan digunakan sebagai landasan konseptual *(entry point)* untuk memahami praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan. Program tersebut dipandang sebagai salah satu bentuk komunikasi pemerintahan digital yang tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi juga membangun hubungan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui forum dialog publik.

Melalui perspektif komunikasi pemerintahan, penelitian ini akan menganalisis bagaimana Paniradya Kaistimewan mengelola penyampaian informasi, membuka ruang interaksi, memanfaatkan umpan balik masyarakat, serta membangun komunikasi dua arah dalam program Rembag Kaistimewan. Selanjutnya, praktik komunikasi tersebut akan dianalisis lebih lanjut menggunakan konsep ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka untuk memahami sejauh mana komunikasi yang berlangsung mencerminkan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.2 Konsep Pemerintahan Terbuka

Menurut Konsep Pemerintahan Terbuka *(Open Government)* berkembang sebagai paradigma tata kelola pemerintahan modern yang menekankan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan kolaborasi sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, konsep pemerintahan terbuka tidak lagi dipahami sebatas penyediaan informasi publik, tetapi berkembang menjadi pendekatan tata kelola pemerintahan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital.

Menurut Gil-Garcia, Gasco, dan Pardo (2020), *Open Government* merupakan pendekatan tata kelola pemerintahan yang bertujuan membangun hubungan yang lebih transparan, partisipatif, kolaboratif, dan akuntabel antara pemerintah dengan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemerintahan terbuka dipandang sebagai suatu sistem yang memungkinkan pemerintah menyediakan informasi secara terbuka, membuka ruang partisipasi publik, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun organisasi masyarakat sipil dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Konsep tersebut menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan terbuka tidak hanya diukur dari penggunaan teknologi digital oleh pemerintah, tetapi lebih jauh ditentukan oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi tersebut untuk memperkuat transparansi, memperluas partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, teknologi digital bukan merupakan tujuan akhir dari pemerintahan terbuka, melainkan instrumen yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Pandangan tersebut sejalan dengan Lathrop dan Ruma sebagaimana dikutip oleh Gant dan Turner-Lee (2011), yang menjelaskan bahwa pemerintahan terbuka merupakan model pemerintahan yang mendorong inovasi bersama seluruh pemangku kepentingan melalui keterbukaan informasi, kolaborasi, serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan nilai publik *(public*

value). Dalam perspektif ini, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai organisasi birokrasi yang bekerja secara tertutup, tetapi sebagai organisasi yang terhubung *(networked government)* dan mampu berbagi informasi maupun sumber daya dengan masyarakat. Komitmen global terhadap penerapan pemerintahan terbuka semakin menguat melalui pembentukan *Open Government Partnership* (OGP) pada tahun 2011 yang diprakarsai oleh delapan negara, termasuk Indonesia. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Developmen* (OECED 2016), pemerintahan terbuka merupakan budaya tata kelola yang didasarkan pada prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan untuk mendukung demokrasi dan pertumbuhan yang inklusif. Kehadiran OGP memperkuat implementasi prinsip-prinsip tersebut melalui pemanfaatan inovasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, konsep Open Government mengadaptasi pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Gil-Garcia, Gasco, dan Pardo (2020) yang menjelaskan bahwa pemerintahan terbuka dibangun melalui empat dimensi utama, yaitu:

1. Transparansi

   Keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang mudah diakses, dapat dipahami, dan relevan bagi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

2. Partisipasi

   Keterlibatan masyarakat dalam proses komunikasi, konsultasi, penyampaian aspirasi, serta diskusi mengenai kebijakan publik.

3. Akuntabilitas

   Kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan, keputusan, serta tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat melalui mekanisme komunikasi yang terbuka.

4. Kolaborasi

   Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menghasilkan solusi bersama terhadap persoalan publik.

Dalam penelitian ini, konsep *Open Government* digunakan sebagai lensa analisis utama untuk memahami praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan. Keempat dimensi yang dikemukakan oleh Gil-Garcia, Gasco, dan Pardo (2020), yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi, digunakan sebagai indikator analisis untuk mengkaji bagaimana praktik komunikasi dalam program tersebut mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka melalui pembentukan ruang publik digital dan komunikasi deliberatif..

2.2.3 Ruang Publik

Konsep ruang publik *(public sphere)* merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian demokrasi, komunikasi, dan ilmu politik yang menjelaskan bagaimana warga negara membangun diskusi mengenai persoalan-persoalan publik secara terbuka. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Jürgen Habermas melalui karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1991). Menurut Habermas, ruang publik merupakan suatu ranah kehidupan sosial tempat terbentuknya opini publik melalui proses komunikasi yang terbuka, rasional, dan bebas dari dominasi kekuasaan.

Habermas (1991), mendefinisikan ruang publik sebagai arena komunikasi yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berkumpul sebagai publik *(public body)* guna mendiskusikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam ruang publik

tersebut, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa adanya pembatasan oleh negara maupun kepentingan ekonomi. Melalui proses komunikasi yang rasional tersebut, ruang publik berfungsi membentuk opini publik yang dapat memengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan.

Secara historis, Habermas menjelaskan bahwa ruang publik modern berkembang dari masyarakat borjuis di Eropa pada abad ke-17 dan ke-18 melalui berbagai ruang diskusi seperti kedai kopi, salon, klub diskusi, surat kabar, dan pamflet. Meskipun lahir dari konteks sejarah tertentu, gagasan utama Habermas bukan terletak pada ruang fisiknya, melainkan pada prinsip-prinsip yang mendasari ruang publik, yaitu keterbukaan akses, kesetaraan partisipasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta diskusi yang rasional dalam membahas persoalan publik. Berdasarkan pemikiran Habermas, ruang publik memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: Pertama, memberikan akses yang terbuka bagi seluruh warga negara; Kedua, menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat; Ketiga mendorong pertukaran argumentasi secara rasional; Keempat, berorientasi pada kepentingan publik, dan terakhir memungkinkan terbentuknya opini publik melalui proses komunikasi yang dialogis (Habermas, 1991). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa ruang publik tidak semata-mata dipahami sebagai tempat fisik, melainkan sebagai arena komunikasi yang memungkinkan berlangsungnya interaksi antara warga negara mengenai isu-isu publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap konsep ruang publik. Jika pada masa Habermas ruang publik diwujudkan melalui ruang-ruang fisik, maka pada era digital ruang publik berkembang ke dalam berbagai platform komunikasi berbasis internet yang memungkinkan masyarakat berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Transformasi ini melahirkan konsep ruang publik digital *(digital public sphere)*, yaitu ruang komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai medium pertukaran informasi, pembentukan opini publik, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Menurut Schäfer (2016), ruang publik digital merupakan arena komunikasi yang terbentuk melalui internet dan media sosial yang memungkinkan masyarakat, pemerintah, media, maupun berbagai aktor

sosial lainnya berpartisipasi dalam diskursus publik. Kehadiran media digital memperluas akses masyarakat terhadap informasi sekaligus membuka peluang terjadinya komunikasi dua arah yang lebih cepat, luas, dan interaktif dibandingkan ruang publik konvensional.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Papacharissi (2014), yang menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah struktur ruang publik dengan menghadirkan ruang komunikasi yang lebih fleksibel, partisipatif, dan berbasis jaringan *(networked public sphere).* Namun demikian, Papacharissi menegaskan bahwa keberadaan media digital tidak secara otomatis menciptakan ruang publik yang demokratis. Kualitas ruang publik digital tetap ditentukan oleh sejauh mana platform mampu memfasilitasi diskusi yang terbuka, pertukaran argumentasi yang rasional, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.

Lebih lanjut, Fuchs (2023), menjelaskan bahwa ruang publik digital harus dipahami tidak hanya sebagai ruang komunikasi berbasis teknologi, tetapi juga sebagai ruang demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, melakukan kritik terhadap kebijakan publik, serta membangun opini publik secara kolektif. Oleh karena itu, keberhasilan ruang publik digital tidak cukup diukur dari tingginya jumlah pengguna atau intensitas komunikasi, tetapi dari kualitas interaksi yang berlangsung di dalamnya, termasuk keterbukaan akses, kesetaraan partisipasi, dan kualitas deliberasi.

Dalam perkembangan terbaru, Fischer dan Jarren (2024), menjelaskan bahwa ruang publik saat ini mengalami proses platformisasi *(platformization of the public sphere),* yaitu perubahan ruang publik yang semakin dipengaruhi oleh karakteristik platform digital. Platform seperti *YouTube* tidak hanya menjadi media penyebaran informasi, tetapi juga menentukan pola interaksi, distribusi informasi, serta pembentukan opini publik melalui fitur-fitur komunikasi yang dimilikinya. Dengan demikian, analisis ruang publik digital pada era media sosial tidak hanya memperhatikan isi komunikasi, tetapi juga bagaimana karakteristik platform memengaruhi proses komunikasi publik.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, ruang publik digital dapat dipahami sebagai arena komunikasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan pemerintah dan masyarakat dalam proses pertukaran informasi,

penyampaian aspirasi, serta pembentukan opini publik. Namun demikian, keberadaan media digital belum tentu menghasilkan ruang publik yang ideal sebagaimana dikemukakan Habermas. Suatu platform baru dapat dikatakan berfungsi sebagai ruang publik apabila mampu menyediakan akses yang terbuka, mendorong partisipasi yang setara, memfasilitasi pertukaran argumentasi yang rasional, serta memungkinkan terjadinya komunikasi yang dialogis antara para aktor yang terlibat.

Dalam penelitian ini, konsep ruang publik digunakan sebagai *bridging theory* yang menghubungkan teori komunikasi pemerintahan dengan komunikasi deliberatif dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan dipandang sebagai suatu forum komunikasi publik yang berpotensi membentuk ruang publik digital antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa *YouTube* secara otomatis merupakan ruang publik digital, melainkan berupaya menganalisis bagaimana praktik komunikasi yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan karakteristik ruang publik sebagaimana dikemukakan Habermas dan dikembangkan dalam kajian ruang publik digital kontemporer. Analisis tersebut meliputi keterbukaan akses terhadap informasi, kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi, kualitas pertukaran argumentasi, serta bagaimana komunikasi yang berlangsung berkontribusi terhadap pembentukan opini publik mengenai isu-isu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, konsep ruang publik dalam penelitian ini menjadi landasan konseptual untuk memahami bagaimana praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan membangun ruang publik digital, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif komunikasi deliberatif dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka.

2.2.4 Komunikasi Deliberatif Sebagai Mekanisme Ruang Publik Digital

Komunikasi deliberatif merupakan konsep yang berkembang dari teori demokrasi deliberatif yang menempatkan komunikasi sebagai mekanisme utama dalam pembentukan opini publik serta legitimasi kebijakan. Secara etimologis, istilah deliberasi berasal dari bahasa Latin deliberatio yang berarti pertimbangan,

konsultasi, atau musyawarah (Hardiman, 2009) Dalam konteks demokrasi modern, deliberasi dipahami sebagai proses pertukaran argumentasi secara rasional yang memungkinkan individu maupun kelompok mencapai pemahaman bersama mengenai persoalan-persoalan publik. Meskipun gagasan mengenai deliberasi telah berkembang sejak pemikiran Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, dan John Dewey, istilah demokrasi deliberatif pertama kali diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada tahun 1980. Selanjutnya, konsep tersebut dikembangkan secara sistematis oleh Jürgen Habermas, yang menempatkan komunikasi sebagai sumber utama legitimasi dalam sistem demokrasi (Hardiman, 2009).

Menurut Habermas (1991), legitimasi suatu keputusan publik tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pemungutan suara atau kehendak mayoritas, melainkan oleh kualitas proses komunikasi yang mendahuluinya. Suatu keputusan memperoleh legitimasi apabila dihasilkan melalui diskusi yang berlangsung secara terbuka, bebas dari dominasi, memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk menyampaikan argumentasi, serta berorientasi pada pencarian pemahaman bersama (mutual understanding). Dengan demikian, komunikasi menjadi elemen utama dalam demokrasi deliberatif karena melalui proses komunikasi yang rasional masyarakat dapat menguji berbagai gagasan sebelum suatu keputusan diambil. Pandangan tersebut diperkuat oleh Reiner Forst yang menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan pendekatan prosedural dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Forst, legitimasi kebijakan tidak berasal dari kehendak mayoritas semata, melainkan dari keterbukaan proses pengambilan keputusan terhadap kritik, argumentasi, serta kemungkinan revisi melalui diskursus publik (Hardiman, 2009). Oleh karena itu, komunikasi deliberatif tidak hanya berfungsi menghasilkan konsensus, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pemikiran Habermas dan Forst, komunikasi deliberatif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: Pertama, keterbukaan akses terhadap forum diskusi; Kedua, kesempatan yang setara bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat; Ketiga, pertukaran argumentasi yang rasional; Keempat, penghormatan terhadap pandangan yang berbeda; serta terakhir

orientasi pada pencapaian pemahaman bersama mengenai kepentingan publik. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kualitas deliberasi tidak diukur dari tercapainya kesepakatan semata, tetapi dari kualitas proses komunikasi yang berlangsung selama diskusi publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas praktik komunikasi deliberatif dari ruang-ruang diskusi konvensional menuju ruang publik digital. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu publik secara lebih luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun demikian, keberadaan media digital tidak secara otomatis menciptakan komunikasi deliberatif. Sebagaimana dikemukakan Habermas (2007), kualitas deliberasi tetap ditentukan oleh keterbukaan akses, kesetaraan partisipasi, rasionalitas argumentasi, serta adanya kesempatan bagi seluruh peserta untuk saling memberikan tanggapan terhadap isu yang didiskusikan.

Perkembangan teori demokrasi deliberatif pada era digital menunjukkan bahwa deliberasi tidak lagi dipahami hanya sebagai proses yang berlangsung dalam satu forum diskusi, tetapi sebagai bagian dari deliberative system yang melibatkan berbagai ruang komunikasi publik. Bächtiger (2018), menjelaskan bahwa kualitas demokrasi deliberatif bergantung pada keterhubungan berbagai ruang publik, media, institusi pemerintahan, dan masyarakat dalam membentuk opini publik secara kolektif. Dengan demikian, proses deliberasi tidak hanya berlangsung dalam lembaga politik formal, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam diskursus publik.

Sejalan dengan itu, (Curato et al., 2021) menegaskan bahwa komunikasi deliberatif pada era kontemporer harus dipahami sebagai suatu proses yang mampu mengakomodasi keberagaman perspektif, membuka kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi, serta menjaga kualitas argumentasi dalam menghadapi tantangan demokrasi digital seperti polarisasi, disinformasi, dan fragmentasi ruang publik. Oleh karena itu, kualitas deliberasi tidak hanya diukur dari intensitas komunikasi, tetapi juga dari kemampuan forum komunikasi dalam menciptakan diskusi yang inklusif, reflektif, dan

berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks komunikasi digital, Stephen Coleman (2017), menjelaskan bahwa media digital memiliki potensi memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar sebagai media penyebarluasan informasi. Menurut Coleman, komunikasi deliberatif pada platform digital ditandai oleh adanya hubungan timbal balik *(reciprocal communication)*, kesempatan masyarakat untuk memberikan argumentasi, serta adanya respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan publik. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi deliberatif pada media digital tidak ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan oleh kualitas dialog yang mampu dibangun antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, komunikasi deliberatif diposisikan sebagai mekanisme komunikasi yang berlangsung di dalam ruang publik digital yang dibangun melalui program Rembag Kaistimewan pada saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan. Oleh karena itu, komunikasi deliberatif tidak diperlakukan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses komunikasi yang digunakan untuk menganalisis kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam forum diskusi tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan karakteristik komunikasi deliberatif, yaitu keterbukaan dialog, kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pertukaran argumentasi antara pemerintah dan masyarakat, respons terhadap aspirasi publik, serta orientasi diskusi pada kepentingan bersama. Hasil analisis terhadap komunikasi deliberatif tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami bagaimana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, khususnya pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Penelitian ini memadukan empat konsep utama, yaitu komunikasi pemerintahan, ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan pemerintahan terbuka (Open Government) sebagai suatu kerangka konseptual yang saling

berkaitan. Keempat konsep tersebut tidak diposisikan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu alur analisis untuk memahami praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan.

Komunikasi pemerintahan menjadi landasan konseptual (entry point) dalam penelitian ini karena objek yang dikaji merupakan praktik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai proses penyampaian informasi secara satu arah *(one-way communication)*, melainkan sebagai komunikasi dua arah *(two-way communication)* yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyampaian aspirasi, serta pemberian umpan balik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan menjadi titik awal untuk memahami bagaimana pemerintah membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat melalui media digital.

Praktik komunikasi tersebut berlangsung melalui program Rembag Kaistimewan yang disiarkan pada saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan. Dalam penelitian ini, *YouTube* tidak diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai medium komunikasi yang memfasilitasi terbentuknya ruang publik digital. Mengacu pada pemikiran Habermas (1991) dan perkembangan konsep ruang publik digital, ruang publik dipahami sebagai arena komunikasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berdiskusi mengenai persoalan-persoalan publik. Dengan demikian, penelitian ini memandang program Rembag Kaistimewan sebagai forum komunikasi pemerintah yang berpotensi membangun ruang publik digital.

Di dalam ruang publik digital tersebut berlangsung komunikasi deliberatif. Komunikasi deliberatif dipahami sebagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi secara terbuka, rasional, dan setara antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi deliberatif tidak diposisikan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di dalam ruang publik digital.

Analisis terhadap komunikasi deliberatif dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana dialog yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, maupun memperoleh respons dari pemerintah.

Selanjutnya, praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam ruang publik digital dan komunikasi deliberatif tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Open Government*. Dalam penelitian ini, *Open Government* tidak dipahami sebagai tujuan yang telah dicapai oleh pemerintah, melainkan sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Mengacu pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Gil-Garcia, Gascó, dan Pardo (2020), penelitian ini menggunakan empat dimensi utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi, untuk menganalisis kualitas komunikasi publik yang berlangsung.

Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini membentuk suatu alur analisis yang dimulai dari praktik komunikasi pemerintahan, kemudian dianalisis melalui karakteristik ruang publik digital, dilanjutkan dengan identifikasi kualitas komunikasi deliberatif yang berlangsung di dalamnya, dan pada akhirnya diinterpretasikan menggunakan perspektif *Open Government*. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan konteks komunikasi, ruang publik digital merupakan arena komunikasi, komunikasi deliberatif merupakan mekanisme komunikasi, sedangkan *Open Government* menjadi perspektif analisis untuk menilai kualitas praktik komunikasi publik yang terjadi dalam program Rembag Kaistimewan.

Menurut Habermas (1991), legitimasi suatu keputusan publik tidak semata-mata ditentukan oleh hasil pemungutan suara atau kehendak mayoritas, melainkan oleh kualitas proses komunikasi yang mendahuluinya. Suatu keputusan memperoleh legitimasi apabila dihasilkan melalui diskusi yang berlangsung secara terbuka, bebas dari dominasi, memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh peserta untuk menyampaikan argumentasi, serta

berorientasi pada pencarian pemahaman bersama (mutual understanding). Dengan demikian, komunikasi menjadi elemen utama dalam demokrasi deliberatif karena melalui proses komunikasi yang rasional masyarakat dapat menguji berbagai gagasan sebelum suatu keputusan diambil. Pandangan tersebut diperkuat oleh Reiner Forst yang menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan pendekatan prosedural dalam pengambilan keputusan politik. Menurut Forst, legitimasi kebijakan tidak berasal dari kehendak mayoritas semata, melainkan dari keterbukaan proses pengambilan keputusan terhadap kritik, argumentasi, serta kemungkinan revisi melalui diskursus publik (Hardiman, 2009). Oleh karena itu, komunikasi deliberatif tidak hanya berfungsi menghasilkan konsensus, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan pemikiran Habermas dan Forst, komunikasi deliberatif memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: Pertama, keterbukaan akses terhadap forum diskusi; Kedua, kesempatan yang setara bagi seluruh peserta untuk menyampaikan pendapat; Ketiga, pertukaran argumentasi yang rasional; Keempat, penghormatan terhadap pandangan yang berbeda; serta terakhir orientasi pada pencapaian pemahaman bersama mengenai kepentingan publik. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa kualitas deliberasi tidak diukur dari tercapainya kesepakatan semata, tetapi dari kualitas proses komunikasi yang berlangsung selama diskusi publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas praktik komunikasi deliberatif dari ruang-ruang diskusi konvensional menuju ruang publik digital. Internet dan media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat, memberikan tanggapan, serta berpartisipasi dalam pembahasan isu-isu publik secara lebih luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun demikian, keberadaan media digital tidak secara otomatis menciptakan komunikasi deliberatif. Sebagaimana dikemukakan Habermas (2007), kualitas deliberasi tetap ditentukan oleh keterbukaan akses, kesetaraan partisipasi, rasionalitas argumentasi, serta adanya kesempatan bagi seluruh peserta untuk saling memberikan tanggapan terhadap isu yang didiskusikan.

Perkembangan teori demokrasi deliberatif pada era digital menunjukkan

bahwa deliberasi tidak lagi dipahami hanya sebagai proses yang berlangsung dalam satu forum diskusi, tetapi sebagai bagian dari deliberative system yang melibatkan berbagai ruang komunikasi publik. Bächtiger et al. (2018), menjelaskan bahwa kualitas demokrasi deliberatif bergantung pada keterhubungan berbagai ruang publik, media, institusi pemerintahan, dan masyarakat dalam membentuk opini publik secara kolektif. Dengan demikian, proses deliberasi tidak hanya berlangsung dalam lembaga politik formal, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform komunikasi digital yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam diskursus publik.

Sejalan dengan itu, (Curato et al., 2021) menegaskan bahwa komunikasi deliberatif pada era kontemporer harus dipahami sebagai suatu proses yang mampu mengakomodasi keberagaman perspektif, membuka kesempatan yang setara bagi warga negara untuk berpartisipasi, serta menjaga kualitas argumentasi dalam menghadapi tantangan demokrasi digital seperti polarisasi, disinformasi, dan fragmentasi ruang publik. Oleh karena itu, kualitas deliberasi tidak hanya diukur dari intensitas komunikasi, tetapi juga dari kemampuan forum komunikasi dalam menciptakan diskusi yang inklusif, reflektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam konteks komunikasi digital, Stephen Coleman (2017), menjelaskan bahwa media digital memiliki potensi memperkuat demokrasi apabila dimanfaatkan sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar sebagai media penyebarluasan informasi. Menurut Coleman, komunikasi deliberatif pada platform digital ditandai oleh adanya hubungan timbal balik *(reciprocal communication)*, kesempatan masyarakat untuk memberikan argumentasi, serta adanya respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan publik. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi deliberatif pada media digital tidak ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan, melainkan oleh kualitas dialog yang mampu dibangun antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam penelitian ini, komunikasi deliberatif diposisikan sebagai mekanisme komunikasi yang berlangsung di dalam ruang publik digital yang dibangun melalui program Rembag Kaistimewan pada saluran *YouTube* resmi

Paniradya Kaistimewan. Oleh karena itu, komunikasi deliberatif tidak diperlakukan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses komunikasi yang digunakan untuk menganalisis kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam forum diskusi tersebut.

Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan karakteristik komunikasi deliberatif, yaitu keterbukaan dialog, kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pertukaran argumentasi antara pemerintah dan masyarakat, respons terhadap aspirasi publik, serta orientasi diskusi pada kepentingan bersama. Hasil analisis terhadap komunikasi deliberatif tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami bagaimana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka, khususnya pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Penelitian ini memadukan empat konsep utama, yaitu komunikasi pemerintahan, ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan pemerintahan terbuka *(Open Government)* sebagai suatu kerangka konseptual yang saling berkaitan. Keempat konsep tersebut tidak diposisikan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu alur analisis untuk memahami praktik komunikasi publik dalam program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan.

Komunikasi pemerintahan menjadi landasan konseptual *(entry point)* dalam penelitian ini karena objek yang dikaji merupakan praktik komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, komunikasi pemerintahan tidak lagi dipahami sebagai proses penyampaian informasi secara satu arah *(one-way communication)*, melainkan sebagai komunikasi dua arah *(two-way communication)* yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyampaian aspirasi, serta pemberian umpan balik antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi pemerintahan menjadi titik awal untuk memahami bagaimana pemerintah membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat melalui media digital.

Praktik komunikasi tersebut berlangsung melalui program Rembag Kaistimewan yang disiarkan pada saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan. Dalam penelitian ini, *YouTube* tidak diposisikan sebagai objek penelitian, melainkan sebagai medium komunikasi yang memfasilitasi terbentuknya ruang publik digital. Mengacu pada pemikiran Habermas (1991), dan perkembangan konsep ruang publik digital, ruang publik dipahami sebagai arena komunikasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berdiskusi mengenai persoalan-persoalan publik. Dengan demikian, penelitian ini memandang program Rembag Kaistimewan sebagai forum komunikasi pemerintah yang berpotensi membangun ruang publik digital.

Di dalam ruang publik digital tersebut berlangsung komunikasi deliberatif. Komunikasi deliberatif dipahami sebagai mekanisme komunikasi yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi secara terbuka, rasional, dan setara antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi deliberatif tidak diposisikan sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di dalam ruang publik digital. Analisis terhadap komunikasi deliberatif dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana dialog yang berlangsung dalam program Rembag Kaistimewan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan, mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, maupun memperoleh respons dari pemerintah.

Selanjutnya, praktik komunikasi publik yang berlangsung dalam ruang publik digital dan komunikasi deliberatif tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Open Government*. Dalam penelitian ini, *Open Government* tidak dipahami sebagai tujuan yang telah dicapai oleh pemerintah, melainkan sebagai lensa analisis untuk menilai sejauh mana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka. Mengacu pada kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Gil-Garcia, Gascó, dan Pardo (2020), penelitian ini menggunakan empat dimensi utama, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi, untuk menganalisis kualitas komunikasi publik yang berlangsung.

Dengan demikian, hubungan antar konsep dalam penelitian ini membentuk suatu alur analisis yang dimulai dari praktik komunikasi pemerintahan, kemudian dianalisis melalui karakteristik ruang publik digital, dilanjutkan dengan identifikasi kualitas komunikasi deliberatif yang berlangsung di dalamnya, dan pada akhirnya diinterpretasikan menggunakan perspektif Open Government. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi pemerintahan merupakan konteks komunikasi, ruang publik digital merupakan arena komunikasi, komunikasi deliberatif merupakan mekanisme komunikasi, sedangkan Open Government menjadi perspektif analisis untuk menilai kualitas praktik komunikasi publik yang terjadi dalam program Rembag Kaistimewan.

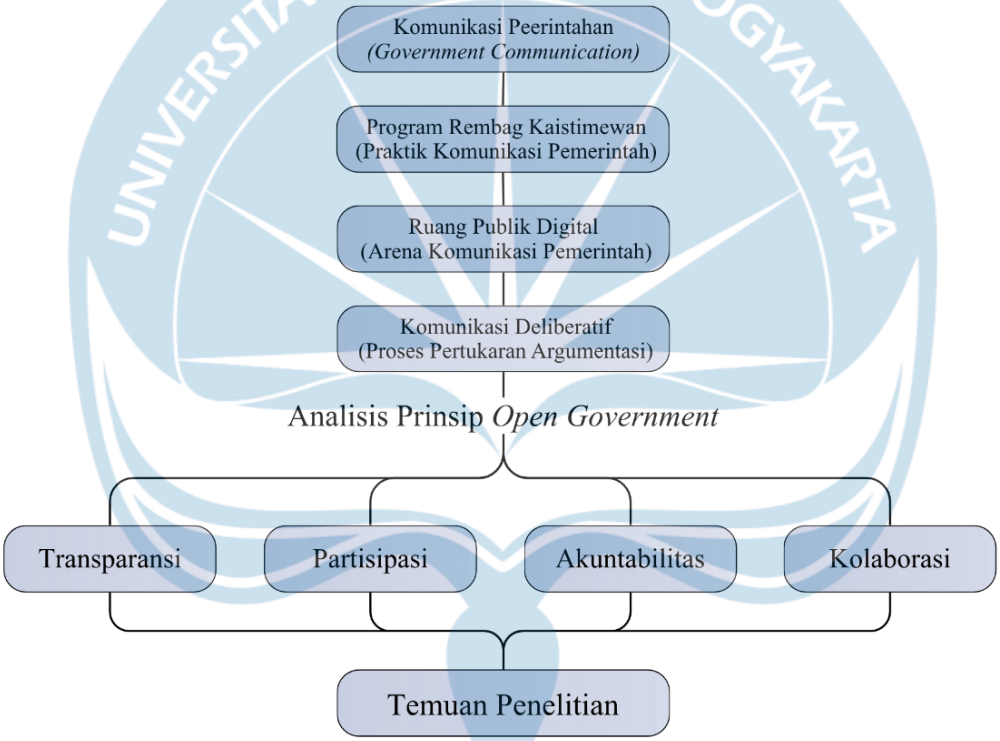
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual ini disusun sebagai dasar untuk menjelaskan hubungan antar konsep yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Kerangka ini mengintegrasikan teori komunikasi pemerintahan, konsep ruang publik digital, komunikasi deliberatif, serta prinsip-prinsip pemerintahan terbuka *(Open Government)* sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam memahami praktik komunikasi publik pada program Rembag Kaistimewan melalui saluran *YouTube* resmi Paniradya Kaistimewan.

Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa komunikasi pemerintahan pada era digital tidak lagi berfungsi sebagai proses penyampaian informasi secara satu arah, melainkan berkembang menjadi komunikasi yang membuka ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, program Rembag Kaistimewan dipandang sebagai praktik komunikasi pemerintahan yang memanfaatkan media digital untuk membangun ruang komunikasi publik.

Praktik komunikasi tersebut selanjutnya dianalisis melalui konsep ruang publik digital untuk memahami sejauh mana forum komunikasi yang dibangun mampu menyediakan akses yang terbuka, mendorong partisipasi masyarakat, serta memfasilitasi pertukaran gagasan mengenai isu-isu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam ruang publik digital tersebut berlangsung komunikasi deliberatif, yaitu proses dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumentasi secara rasional antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari komunikasi publik.

Selanjutnya, kualitas praktik komunikasi publik yang berlangsung dianalisis menggunakan perspektif Open Government dengan mengadaptasi kerangka konseptual yang dikembangkan oleh Gil-Garcia, Gascó, dan Pardo (2020). Melalui perspektif tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik komunikasi dalam program Rembag Kaistimewan mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis untuk memahami hubungan antara praktik komunikasi pemerintahan, pembentukan ruang publik digital, komunikasi deliberatif, dan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam konteks Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta..



Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian
Sumber : Dokumen Pribadi